

FAKTOR PENGHAMBAT BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH SUMBAR (BPJN) DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN DI KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG

Ake Fernandes^{1(a)}, Hasbullah Malau^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
^{a)}akefernandes46@gmail.com, ^{b)}hasbullahmalau@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

26-05-2022

Selesai Revisi:

20-06-2022

Diterbitkan Online:

27-06-2022

Kata Kunci:

Pengawasan, Pembangunan Jalan

Keywords:

Supervision, Construction Roads

Corresponding Author:

akefernandes46@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Faktor Penghambat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumbar Dalam Melaksanakan Pengawasan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Adapun berbagai permasalahan tindakan pengawasan sangatlah kurang dijalankan karena masih banyak jalan yang berlobang, masih banyak terjadinya penyimpangan pengawasan seperti pekerjaan penanganan pengaspalan jalan di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung sehingga hasilnya terlihat asal-asalan serta belum optimalnya fungsi pengawasan Balai besar pelaksanaan jalan nasional (BPJN) wilayah sumbar seperti pengaspalan tidak sempurna sehingga terdapat retakan dan mengelupas. Penelitian ini dilakukan dengan jenis kualitatif dengan metode deskriptif, dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode dan teknik purposive sampling. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Penghambat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumbar Dalam Melaksanakan Pengawasan Pembangunan Jalan Di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung yaitu kurangnya personil pengawas lapangan dan Biaya pengawasan kurang serta sarana dan prasarana.

ABSTRACT

This study intends to find out the inhibiting factors for the Central Sumatran National Road Implementation Center in Implementing Road Construction Supervision in Sijunjung District, Sijunjung Regency. As for the various problems of supervising actions that are very poorly implemented because there are still many roads with holes, there are still many supervisory deviations such as the work of handling road asphalt in Sijunjung District, Sijunjung Regency so that the results look careless and the supervisory function of the Regional National Road Implementation Center (BPJN) is not optimal. sources such as paving are not perfect so there are cracks and peeling. This research was conducted with a qualitative type with a descriptive method, in determining the informants the researcher used purposive sampling methods and techniques. For data collection techniques, interviews, observations, and documentation were carried out. In testing the validity of the data, the researcher used a method triangulation technique. As for the data analysis technique using data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the inhibiting factors for the Central Sumatra Regional National Road Implementation in Carrying out Supervision of Road Construction in Sijunjung District, Sijunjung Regency, were the lack of field supervisory personnel and the lack of supervision costs as well as facilities and infrastructure.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v1i2.11>



PENDAHULUAN

Jalan merupakan komponen penting dari infrastruktur dasar yang dibutuhkan orang agar dapat bergerak bebas dari satu tempat ke tempat lain dan memenuhi kebutuhan mereka. Ketika telah terjadi ekspansi yang signifikan dalam kegiatan ekonomi kota, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan jumlah jalan raya di daerah tersebut.

Setelah era otonomi daerah di Indonesia, kewenangan penyelenggaraan jalan dibagi menjadi tiga tingkat pemerintahan yang berbeda: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah daerah provinsi diizinkan menyelenggarakan jalan provinsi; pemerintah daerah kabupaten dan kota berwenang menyelenggarakan jalan kabupaten dan kota; serta pemerintah pusat berhak menyelenggarakan jalan nasional dan jalan tol. Dalam konteks ini, kegiatan pengelolaan jalan digambarkan sebagai seperangkat tanggung jawab yang berkaitan dengan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan raya.

Penyusunan kebijakan perencanaan, penyusunan rencana umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan adalah semua kegiatan yang termasuk dalam kategori pengaturan jalan. Di sisi lain, pembangunan jalan mencakup kegiatan seperti penyusunan pedoman dan standar teknis, memberikan pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, dan melakukan penelitian dan pengembangan di jalan. Pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian serta pemeliharaan suatu jalan.

Pengawasan jalan yakni kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan pengaturan dan pengarahannya serta pembangunan jalan dilakukan dengan tertib. Proses pembangunan jalan mencakup sejumlah kegiatan yang berbeda, termasuk pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Prosedur pengawasan diperlukan untuk mempertahankan standar kualitas tertentu. Menurut (Daulay, 2017), menambahkan pengawasan yakni proses mengamati pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Pengawasan yang dilaksanakan pada intinya dapat diarahkan sepenuhnya sedemikian rupa untuk menghilangkan potensi penyimpangan dari sasaran atau tujuan yang sedang diusahakan. Diharapkan pemerintah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat melalui proses pengawasan pembangunan melalui pelaksanaan kebijakan yang sudah ditentukan dalam mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin. Bahkan tindakan sederhana mengawasi apa pun dapat menimbulkan tugas yang berhubungan langsung dengan mengidentifikasi atau mengevaluasi sejauh mana kegiatan pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan. Dalam proses pengawasan juga dapat ditentukan sejauh mana kebijakan kebijakan pimpinan dijalankan, serta seberapa sering terjadi penyimpangan dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan.

Selain itu, pengawasan menjadi komponen penting dari pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjamin terlaksananya tanggung jawab pemerintah di bidang pembangunan. Selanjutnya, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak boleh diremehkan jika suatu organisasi ingin mencapai tujuan utamanya atau memenuhi misi utamanya.

Tanpa pengawasan, pembangunan infrastruktur jalan tidak dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Dengan adanya pengawasan juga dimungkinkan untuk mencegah suatu tindakan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah direncanakan; Namun, yang terjadi saat ini adalah tidak dilaksanakannya kegiatan pengawasan sehingga seringkali menimbulkan penyimpangan. Tidak hanya perlu mengikuti langkah-langkah dalam proses pelaksanaan pengawasan, seperti menetapkan standar dan memberikan penilaian serta melakukan tindakan penilaian, akan tetapi perlu menerapkan sifat serta waktu pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan berjalan dengan lancar.

Skala tantangan yang dihadapi dalam proses pengawasan pembangunan jalan di Kecamatan Sijunjung yang terletak di dalam Kabupaten Sijunjung terlihat jelas dari informasi dan uraian yang disajikan di atas. Adapun berbagai permasalahan tindakan pengawasan sangatlah kurang dijalankan karena masih banyak jalan

yang berlobang, masih banyak terjadinya penyimpangan pengawasan seperti pekerjaan penanganan pengaspalan jalan di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung amburadul, sebab ada pengurangan volume pekerjaan, sehingga hasilnya terlihat asal-asalan serta belum optimalnya fungsi pengawasan Balai besar pelaksanaan jalan nasional (BPJN) wilayah sumbar seperti pengaspalan tidak sempurna sehingga terdapat retakan dan mengelupas.

Dengan demikian, peneliti ingin melihat tentang faktor yang menghambat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumbar dalam melaksanakan pengawasan pembangunan jalan di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu kualitatif dengan suatu pendekatan deskriptif, karena menggambarkan, menceritakan, dan menawarkan interpretasi situasi atau peristiwa dalam keadaan saat ini. Secara khusus, investigasi dilakukan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumatera Barat yang terletak di Kabupaten Sijunjung. Dalam penelitian ini, sumber atau informan dipilih dengan menggunakan proses purposive sampling. Metode observasi dan wawancara, serta dokumentasi digunakan untuk pengumpulan suatu data oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat variabel-variabel yang menjadi kendala dalam proses pembangunan jalan di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi proses. Pengawasan pembangunan jalan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya sejak perencanaan sampai pembangunan selesai. Pertimbangan tersebut antara lain sebagai berikut:

Kurangnya Personil Pengawas Lapangan

Pemilik proyek memilih seseorang untuk mengawasi pembangunan jalan dan memanggil orang itu sebagai pengawas. Pengawas dapat berupa manusia atau badan usaha. Untuk memastikan bahwa proses pengawasan berhasil dilakukan, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan di berbagai bidang, termasuk teknik sipil, arsitektur, dan lain-lain. Kerjasama antara kontraktor dan pengawas jalan diperlukan dalam suatu proyek jalan untuk menjamin kesinambungan, yang menghasilkan

hasil yang diinginkan. Juga tidak boleh ada kerugian antara supervisor dan kontraktor. Pengawas jalan biasanya diadakan dalam proses pengawasan jalan. Pengawas jalan mengawasi proyek jalan dari perencanaan hingga penyelesaian.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumbar dalam mengawasi pembangunan jalan di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung sangat terkendala dengan minimnya personel pengawas. Jumlah personel ini perlu ditambah agar pengawasan dapat berjalan efektif. Karena tidak adanya pengawas yang cukup untuk berkeliling selama pembangunan jalan di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, kualitas pengawasannya mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Ini karena sejumlah besar pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu tertentu.

Biaya Pengawasan Kurang

Pengelolaan keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam proyek pembangunan jalan. Oleh karena itu, diperlukan pengeluaran keuangan yang besar untuk pengawasan setiap proyek pembangunan jalan. Karena pengawasan menyangkut sarana dan prasarana yang mampu mendukung pengawasan yang telah dilakukan dan pengawasan yang sedang dilaksanakan, maka pengawasan memerlukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kedua jenis pengawasan tersebut. Di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, untuk bertugas sebagai pengawas proyek pembangunan jalan. Jika standar ini tidak terpenuhi, pengawasan proyek jalan akan lebih lambat.

Peran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumbar dalam pengawasan pembangunan jalan di Kecamatan Sijunjung di Kabupaten Sijunjung masih kurang dalam hal biaya pengawasan untuk monitoring proyek jalan. Hal ini dikarenakan sedikitnya biaya pengawasan di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung yang dapat mempersulit pengawasan. Sebagian besar biaya pengawasan digunakan untuk infrastruktur, khususnya peningkatan pembangunan jalan. Belum semua kebutuhan pembangunan jalan dapat dipenuhi karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pengawasan proyek jalan yaitu tambahan yang diperlukan dalam pengawasan itu sendiri, yang sangat penting untuk memenuhi persyaratan pekerjaan proyek jalan. Secara kuantitatif dan kualitatif, pembangunan sarana dan prasarana pemantauan jalan di daerah tujuan perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan penanggung jawab proyek jalan tersebut.

Sarana pengawasan proyek jalan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang secara langsung atau tidak langsung memberikan pengawasan kepada pekerja jalan di suatu daerah tujuan yang keberadaannya sangat tergantung pada pengawas. Hal ini dikarenakan keberadaan daerah tujuan sangat bergantung pada pengawas. Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan layanan publik lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Infrastruktur juga terkait dengan penataan infrastruktur jalan dan pencapaian tujuan. Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumatera Barat masih membutuhkan sarana dan prasarana yang mampu memberikan bantuan kepada pemerintah agar pengawasan terhadap proyek jalan dapat dilakukan secara efektif. Sekalipun sarana dan prasarana yang kini tersedia di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumatera Barat masih minim, hal itu tidak menyurutkan semangat mereka dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam pengawasan proyek jalan.

PENUTUP

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumbar terdapat faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan pembangunan jalan di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung yaitu pertama kurangnya personil pengawas lapangan. Hal ini dilihat dari jumlah personil yaitu 4 orang. Dengan demikian Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah sumbar dalam pengawasan pembangunan jalan di kecamatan Sijunjung kabupaten Sijunjung sangat kurang dalam hal personel pengawas yang harus ditingkatkan agar pengawasan berjalan secara optimal. Kedua Biaya pengawasan kurang. Hal ini masih kurang dalam hal biaya pengawasan untuk pengawasan proyek jalan, disebabkan kurangnya biaya yang terkait dengan

pengawasan proyek jalan merupakan hambatan. Ketiga Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumbar masih terbatas itu tidak mengurangi semangat dalam melakukan pekerjaannya terutama dalam pengawasan terhadap proyek jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriananda. (2020). Pemenuhan Kapasitas Manajemen Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggara Infrastruktur Jalan: Studi Kasus Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV Manado. *Jurnal Good Governance*, 16(1), 91–98. <https://doi.org/10.32834/gg.v16i1.156>.
- Anwar, A. (2005). *Ketimpangan pembangunan wilayah dan pedesaan*. Bogor. P4W.
- Baba, A. (2016). *Pengantar manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daulay, D. Dkk. (2017: 218, 219, 220, 222). *Manajemen*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Fahmi, I. (2014: 138, 143). *Manajemen Kepemimpinan: Teori & Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Handoko, T. Hani. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Kadarisman, M. (2015: 173, 194, 201). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Karmila Akib. (2017). Peran pemerintah, pembangunan, infrastruktur jalan Di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie Volume : 8 Nomor : 1 Edisi : Maret 2017*, 8(1).
- Risnataliya,), Uceng, A., & Yaqub, R. (2019). Peran Pengawasan Terhadap Pembangunan Jalan Provinsi Di Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Upt Wilayah Iii Parepare Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 7(Februari), 20–24.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Siagian, Sondang . (2014). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Alfabeta

Syamsir, Torang. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta

Yulianti, R., & Hasanah, B. (2018). Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 6(2), 111–125. <https://doi.org/10.30656/sawala.v6i2.926>

Zubaidah, S. (2019). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Pemerintah Dan Politik Global*, 04(01), 7–12.